

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Penegakan hukum di Indonesia, pembinaan dan pengarahan, perlu dilakukan supaya hukum mampu memenuhi kebutuhan sesuai dengan tingkat kemajuan masyarakat Indonesia. Penegakan hukum merupakan tanggung jawab dari semua lapisan masyarakat dan khususnya yang mempunyai kepentingan terhadap hukum karena setiap orang dianggap mengetahui dan setidaknya merasakan apa yang disebut dengan hukum, berkaitan dengan hal tersebut, Moeljatno menegaskan :

*“Selain daripada kewajiban pemerintah untuk dengan bijaksana menyesuaikan apa yang ditentukan sebagai perbuatan pidana itu dengan perasaan hukum yang hidup dalam masyarakat, maka penentuan itu juga tergantung pada pandangan, apakah ancaman dan penjatuhan pidana itu adalah jalan utama untuk mencegah dilanggarnya larangan-larangan tersebut.”<sup>1</sup>*

Perbuatan-perbuatan pidana menurut sifatnya adalah bertentangan dengan tata atau ketertiban yang dikehendaki oleh hukum yang berlaku, dapat dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang merugikan masyarakat, menghambat, bertentangan dengan tata kehidupan masyarakat yang baik dan adil. Perbuatan pidana merupakan salah satu

---

<sup>1</sup> Moeljatno, 1993, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, hlm 4.

aspek yang diatur oleh hukum pidana disamping pertanggungjawaban pidana dan prosedur pidana.

Perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana masuk dalam lingkup hukum pidana materiil, sedangkan prosedur pidana masuk dalam lingkup hukum formil. Untuk menentukan perbuatan pidana, kita menganut asas legalitas ( *the principle of legality* ), yakni asas yang menentukan bahwa tiap-tiap perbuatan pidana harus ditentukan sebagai demikian oleh suatu aturan Undang-Undang ( Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ) atau setidaknya oleh suatu aturan hukum yang telah ada dan berlaku bagi terdakwa sebelum orang dapat dituntut untuk dipidana karena perbuatannya.

Ada beberapa asas yang dapat dikatakan tidak diatur dengan tegas, akan tetapi telah dianggap berlaku di dalam praktek hukum pidana, yaitu :

1. Tidak dipidana tanpa kesalahan ( *Geen straf zonder schuld* ).
2. *Rechtsvaardigingsronden* ( alasan pembenar ).
3. *Schulduitingronden* ( alasan pemaaf ).
4. *Onvervolgbaarheid* / *Vervolgbaarheid uitsluiten* ( alasan penghapusan penuntutan ).<sup>2</sup>

Asas tersebut dikatakan sebagai dasar untuk alasan meniadakan suatu tindak pidana dari seseorang yang disangka atau dituduh melanggar

---

<sup>2</sup> Bambang Purnomo, 1978, Asas-Asas Hukum Pidana, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm 76.

peraturan hukum pidana, akan tetapi di dalam KUHP tidak dijumpai dan hanya termuat ketentuan dalam beberapa pasal tentang penghapusan pidana yaitu, “barangsiapa melakukan perbuatan pidana diancam pidana, akan tetapi ini belum berarti bahwa tiap-tiap orang yang melakukan perbuatan tersebut lalu mesti dipidana, sebab untuk memidana seseorang di samping melakukan perbuatan pidana yang dilarang, dikenal asas yang berbunyi “tidak dipidana jika tak ada kesalahan”. Dalam bahasa Belanda asas ini disebut “*Geen straf zonder schuld*”, sedangkan dalam bahasa Jerman disebut “*keine straf ohne schuld*”. Dalam bahasa latin asas ini dikenal dengan ungkapan “*Actus non facit reum, nisi mens sit rea*”. Dalam bahasa Inggris terdapat ungkapan “*An act does not make a person guilty, unless the mind is guilty*”. Asas tersebut tidak kita dapati dalam K.U.H.P sebagaimana halnya dengan asas legalitas. Juga tidak ada dalam lain-lain perundang-undangan”.<sup>3</sup>

*Geen straf zonder schuld* dan *schulduitsluitingsgronden* adalah dua hal yang mempunyai kesamaan, akan tetapi penggunaannya berbeda. *Geen straf zonder schuld* adalah asas yang bersifat umum dan luas yang biasanya *schuld* itu mengandung tiga macam sifat atau elemen, yaitu : pertama adanya kemampuan bertanggung jawab dari pembuat, kedua adanya keadaan batin tertentu dari pembuat yang dihubungkan dengan kejadian dalam bentuk kesengajaan atau kealpaan, dan ketiga tidak

---

<sup>3</sup> Moeljatno, 1993, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, hlm 5.

terdapatnya pertanggung jawaban atas suatu kejadian oleh pembuat karena menjadi alasan penghapusan pidana.

Oleh karena kesengajaan atau kealpaan itu adalah bentuk dari kesalahan, maka adalah lebih baik apabila di dalam sebuah aturan umum terdapat suatu pertanggung jawaban atas kejadian oleh pembuat yang menjadi suatu alasan penghapusan pidana yang disebabkan karena hal-hal lain yang tidak termasuk kesalahan, dan dipandang sebagai *schulduitsluitingsgronden* atau sebagai alasan pemaaf terhadap suatu perbuatan pidana yang terjadi namun kesalahan pembuat dihapuskan atau ditiadakan. Dalam teori hukum pidana biasanya alasan-alasan yang menghapuskan pidana dibedakan menjadi tiga, yaitu :

1. Alasan membenar
2. Alasan Pemaaf
3. Alasan Menghapus Tuntutan

Berdasarkan uraian tersebut di atas, penulis memfokuskan pada alasan pemaaf dalam penulisan hukum / skripsi ini dengan judul **“Penggunaan Alasan Pemaaf oleh Hakim Dalam Memutus Perkara Pidana ( Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Yogyakarta )”**, karena penulis ingin mengetahui lebih banyak tentang bagaimana putusan hakim dalam memutus bebas suatu perkara pidana berdasarkan alasan pemaaf.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Apa dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara pidana menggunakan alasan pemaaf karena pengaruh daya paksa (*overmacht*) ?.
2. Kendala apa yang dialami oleh hakim dalam memutus bebas terdakwa dengan menggunakan alasan pemaaf karena pengaruh daya paksa ( *overmarcht* ) ?.

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian adalah sebagai berikut :

1. Mempelajari dan memperoleh data tentang dasar pertimbangan hakim yang memutus bebas suatu perkara pidana menggunakan alasan pemaaf karena pengaruh daya paksa ( *overmacht* ).
2. Mempelajari dan memperoleh data tentang kendala yang dialami oleh hakim dalam memutus bebas terdakwa dengan menggunakan alasan pemaaf karena pengaruh daya paksa ( *overmacht* ).

## **D. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini, dapat memberikan manfaat untuk :

1. Mahasiswa Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Sebagai sumbangan bahan bacaan dan kajian bagi para mahasiswa Fakultas Hukum, serta sebagai masukan dalam pengembangan ilmu

hukum, khususnya dalam hukum pidana dan ilmu pengetahuan pada umumnya.

## 2. Masyarakat

Memberikan tambahan pengetahuan kepada masyarakat khususnya mengenai putusan-putusan hakim dalam memutus bebas suatu perkara pidana dengan menggunakan alasan pemaaf.

## 3. Penulis

Mengetahui tentang penggunaan alasan pemaaf karena pengaruh daya paksa ( *overmacht* ), dan bagaimana pengambilan putusan oleh hakim di Pengadilan Negeri Yogyakarta.

## E. Keaslian Penelitian

Ada beberapa penulisan hukum yang telah dilakukan oleh beberapa penulis sebelumnya yang berkaitan dengan topik yang akan ditulis oleh penulis, yaitu :

1. Judul : “Analisis Yuridis Konstruksi Hukum Pembuktian Hakim Pengadilan Negeri Jepara Dalam Menjatuhkan Putusan Berupa Dilepas Dari Segala Tuntutan Hukum ( *Onlsag Van Alle Recthsvervolging* ) Terhadap Terdakwa Dalam Perkara Perbuatan Tidak Menyenangkan Dan Upaya Hukumnya ( Studi Kasus Dalam Putusan No. 217/PIN.B/2006/PN.JPR, Tanggla 23 Aptil 2007 )”.

Penulis : Tri Eka Hermawati ( Universitas Sebelas Maret )

Rumusan Masalah :

- a. Bagaimana konstruksi hukum penuntut umum sebagai alasan kasasi terhadap putusan dilepas dari segala tuntutan hukum Pengadilan Negeri Jepara dalam perkara penghunian rumah tidak sah ?.
- b. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memeriksa dan memutus pengajuan kasasi penuntut umum terhadap putusan dilepas dari tuntutan hukum dalam perkara penghunian rumah tidak sah?

Tujuan Penulisan :

- a. Untuk mengetahui secara jelas mengenai konstruksi hukum yang digunakan oleh penuntut umum sebagai alasan pengajuan kasasi terhadap putusan dilepas dari segala tuntutan hukum (onslag van alle rechtsvervolging) dalam perkara penghunian rumah tidak sah.
- b. Untuk mengetahui secara jelas mengenai pertimbangan hakim dalam memeriksa dan memutus pengajuan kasasi penuntut umum terhadap putusan dilepas dari segala tuntutan hukum (onslag van alle rechtsvervolging) dalam perkara penghunian rumah tidak sah.

Tujuan Penulisan : Untuk menganalisis putusan yuridis dari hakim Pengadilan Negeri Surakarta dalam putusan lepas dari segala tuntutan.

Kesimpulan ( Penulis ) : Terhadap putusan Pengadilan, Terpidana berhak melakukan upaya hukum berupa menerima atau menolak putusan tersebut. Menurut Pasal 1 butir (12) KUHAP, Upaya hukum adalah hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupa perlawanan atau banding atau kasasi atau hak terpidana untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali (PK) dalam hal serta menurut cara yang diatur-dalam undang-undang.

2. Judul : “Overmacht Dalam Tindak Pembunuhan ( Studi Komparatif antara Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Indonesia )”.

Penulis : Muh Wahib Muslim ( IAIN Walisongo Semarang )

Rumusan Masalah :

- a. Bagaimana dasar hukum dan alasan Overmacht dalam tindak pidana pembunuhan menurut hukum pidana Islam dan hukum pidana Indonesia.



b. Bagaimana penerapan sanksi bagi pelaku tindak pidana pembunuhan karena overmacht menurut hukum pidana Islam dan hukum pidana Indonesia.

Tujuan Penulisan : Membandingkan penggunaan Overmacht dalam hukum pidana Islam dengan hukum pidana Indonesia.

Kesimpulan : dalam hukum pidana Islam, overmacht tidak dapat menghapuskan hukuman terhadap tindak pidana pembunuhan dan penjatuhan sanksi merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan dari pelaku overmacht dalam tindak pidana pembunuhan. Sedangkan menurut hukum pidana Indonesia, pembunuhan yang dilakukan karena overmacht dapat menghapuskan hukuman. Dengan adanya alasan pembeda dan alasan pemaaf, pelaku dinyatakan lepas dari tuntutan hukum.

3. Judul : “Tinjauan Putusan Bebas dari Segala Dakwaan dan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum di Wilayah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta”.

Penulis : FR. Ismadi Tri Murdjaka ( Universitas Atma Jaya Yogyakarta )

Rumusan Masalah : Jenis pertimbangan apa saja yang dijadikan dasar putusan bebas dari segala dakwaan dan lepas dari

segala tuntutan hukum dalam kasus pencurian di wilayah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta.

Tujuan penulisan : Untuk mengetahui jenis pertimbangan apa saja yang dijadikan dasar putusan bebas dari segala dakwaan dan lepas dari segala tuntutan hukum di wilayah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta.

Kesimpulan :

- a. Bahwa dalam putusan bebas dari segala dakwaan dasarnya : bahwa jika perbuatan yang didakwakan tidak terbukti sah dan meyakinkan dan terdakwa tidak bersalah melakukannya atas dasar pembuktian dengan menggunakan alat bukti menurut ketentuan hukum acara.
- b. Dalam putusan lepas dari segala tuntutan hukum, pertimbangannya : apabila Hakim berpendapat perbuatan yang dilakukan terbukti tetapi tidak merupakan tindak pidana karena memenuhi pasal 44, 48, 49, 50, dan 51 KUHP.
- c. Adanya ketidaktepatan pemberian putusan banyak terjadi karena hakim kurang mempertimbangkan faktor hukum dan banyak dipengaruhi oleh opini masyarakat yang kadang tidak sesuai dengan hukum.
- d. Opini masyarakat bahwa hukum terkadang dikalahkan

Berbeda dengan penulisan hukum tersebut di atas, penulisan hukum yang penulis tulis ini difokuskan pada penggunaan alasan pemaaf dalam putusan hakim terhadap perkara pidana ( studi kasus di Pengadilan Negeri Yogyakarta ).

#### **F. Batasan Konsep**

##### **1. Daya Paksa ( *Overmacht* )**

Daya paksa dalam pasal tersebut adalah salinan kata Belanda “*overmacht*”, yang artinya suatu keadaan, kejadian yang tidak dapat dihindarkan dan terjadi di luar dugaan (di luar kekuasaan manusia).

##### **2. Hakim**

Menurut Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman hakim adalah hakim pada Mahkamah Agung dan Hakim pada badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha Negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut.

##### **3. Alasan Pemaaf**

Alasan yang menghapuskan kesalahan terdakwa. Yakni perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tetap bersifat melawan hukum dan

tetap merupakan perbuatan pidana akan tetapi terdakwa tidak dipidana karena tidak ada kesalahan.

#### 4. Pengadilan Negeri Yogyakarta

Adalah pengadilan atau dewan yang mengadili perkara yang wewenangnya di daerah wilayah hukum Kota Yogyakarta.

### **G. Metode Penelitian**

#### 1. Jenis Penelitian

Dilihat dari segi jenis penelitaian, penelitian ini merupakan penelitian normatif yaitu sejenis penelitan yang berfokus pada norma ( *law in the book* ), sehingga menitik beratkan pada data sekunder, sedangkan data primer sebagai data pendukung dan melengkapi penelitian.

#### 2. Sumber Data

Data dalam penelitian ini bersumber dari :

- a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung melalui penelitian lapangan dalam hal ini pihak yang terkait langsung sesuai permasalahan yang diteliti, melalui wawancara langsung dengan hakim di Pengadilan Negeri Yogyakarta.
- b. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dengan mengamati, mempelajari, dan membaca bahan-bahan hukum maupun

kepustakaan dan dokumen-dokumen yang terkait dengan penelitian ini, yang dapat dibedakan menjadi 2, yaitu :

1) Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tindakan hakim dalam memutus suatu perkara pidana dengan menggunakan alasan pemaaf di Pengadilan Negeri Yogyakarta, yaitu :

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ( *wetboek van strafrecht* ).
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- c) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang diperoleh dengan cara melakukan studi pustaka terhadap peraturan perundang-undangan, buku-buku literatur dan peraturan lain yang terkait dengan obyek penelitian untuk selanjutnya diseleksi, dikaji, dan dipertimbangkan relevansinya dengan masalah yang diteliti.

### 3. Metode Pengumpulan Data

#### a. Studi Pustaka

Mendapatkan data sekunder melalui penelusuran kepustakaan yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan mempelajari, mengidentifikasi dan mengkaji peraturan perundang-undangan, buku, pustaka maupun dokumen-dokumen lainnya yang berkaitan dengan penelitian.

b. Wawancara

Mendapatkan data primer, dengan cara *interview* atau wawancara dengan menggunakan daftar pertanyaan yang sudah disiapkan terlebih dahulu sebagai pedoman untuk wawancara yang akan dilakukan terhadap subyek penelitian.

4. Nara Sumber

Nara Sumber dalam penelitian ini adalah Hakim pada Pengadilan Negeri Yogyakarta yang ditunjuk.

5. Metode Analisis

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini dianalisis secara kualitatif, yaitu menganalisis dengan cara memaparkan secara rinci dan tepat, kemudian hasilnya dikelompokkan dan diseleksi menurut kualitas serta kebenarannya. Dalam menarik kesimpulan digunakan metode berfikir deduktif, yaitu menyimpulkan dari pengetahuan yang bersifat umum kemudian digunakan untuk menilai suatu peristiwa bersifat khusus.

## **H. Sistematika Penulisan Hukum**

Untuk memberikan gambaran secara menyeluruh sesuai dengan aturan dalam penulisan karya ilmiah, maka penulis menyiapkan kerangka penulisan hukum. Kerangka penulisan hukum ini terdiri dari tiga bab yaitu pendahuluan, pembahasan, dan penutup, ditambah dengan lampiran-lampiran daftar pustaka yang disusun sebagai berikut:

### **Bab: I . PENDAHULUAN**

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian dan sistematika skripsi.

### **Bab : II. PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA PIDANA**

Dasar pertimbangan hakim dalam memutus bebas suatu perkara pidana dengan menggunakan alasan pemaaf di Pengadilan Negeri Yogyakarta, tentang akibat hukum yang terjadi pada putusan bebas yang diberikan oleh hakim Pengadilan terhadap terdakwa. Dan memaparkan hasil dari penelitian di Pengadilan Negeri Yogyakarta tentang tindak pidana dikarenakan daya paksa ( *overmacht* ).

### **Bab : III. SIMPULAN DAN SARAN**

Kesimpulan dan saran dari penulisan hukum ini adalah untuk mengetahui dasar-dasar putusan hakim dalam menggunakan alasan pemaaf karena pengaruh daya paksa ( *overmacht* ), dan agar setiap putusan disikapi dengan bijak.

